

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Ali, Achmad. (2010). *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Undang-Undang (Legisprudence) Volume I Pemahaman Awal*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Amiruddin & Asikin Zainal. (2012). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Asikin, Zainal. (2015). *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*, Jakarta : Prenada Media.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Ed. 4 . Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Fuady, Munir. (2015). *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*. Bandung : PT. Citra Aditya Bhakti.
- Harahap, Yahya. (1986). *Segi-segi Hukum Perjanjian*. Bandung : Alumni.
- Harnanto. (2002). *Akuntansi Perpajakan*. Yogyakarta : BPFÉ.
- H.S, Salim. (2003). *Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta : Sinar Grafika.
- H.S, Salim. (2015). *Perkembangan Hukum Kontrak Inominaat di Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Kansil, C.S.T.. (2006). *Modul Hukum Perdata Termasuk Asas-Asas Hukum Perdata*. Jakarta : PT Pradnya Paramita.
- Marwan, M. & Jimmi P. (2009). *Kamus Hukum : Dictionary of Law Complete Edition*. Surabaya : Reality Publisher.

- Marzuki, Peter Mahmud. (2008). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta : Kencana Prenada Media.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2011). *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Miru, Ahmadi. (2020). *Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak*, Depok : Rajawali Pers.
- Muhammad, Abdulkadir. (1982). *Hukum Perjanjian*, Bandung : Alumni.
- Muhammad, Abdulkadir. (2010). *Hukum Perusahaan Indonesia*. Bandung : PT Citra Aditya Bakti.
- Muhammad, Abdulkadir. (2015). *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2015.
- Nugroho, Susanti Adi. (2015). *Penyelesaian Sengketa Arbitrase dan Penerapan Hukumnya*, Jakarta: Prenamedia Group.
- Purwosusilo. (2014). *Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa*. Jakarta : Prenamedia Group.
- Prodjodikoro, Wirjono. (2012). *Asas-asas Hukum Perjanjian*. Bandung : Sumur Pustaka.
- Safudin, Endrik. (2018). *Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase*, Malang : Intrans Publishing.
- Setiawan, R. (1999). *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*. Cet. 6. Bandung : Putra A. Dardin.
- Soekanto, Soerjono & Sri Mahmudji. (2009). *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Ed.1 Cet.11. Jakarta : Rajawali Pers.

Subekti. (2005). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta : Intermasa.

Sudarsono. (2007). *Kamus Hukum*. Jakarta : Rineka Cipta.

Tambunan, Toman Sony & Wilson R.G. Tambunan. (2019). *Hukum Bisnis*.  
Jakarta : Prenamedia Group.

## **B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 1958 tentang  
Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan Milik Belanda, Lembaran Negara  
Tahun 1958 Nomor 162.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok  
Agraria, Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan  
Lembaran Negara Nomor 2043.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang  
Perkawinan, Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan  
Lembaran Negara Nomor 3019.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase  
dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Lembar Negara Tahun 1999  
Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3872.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1963 Tentang  
Pendirian Perusahaan Negara Kereta Api, Lembar Negara Tahun 1963  
Nomor 43.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1971 tentang Pengalihan Bentuk Usaha Perusahaan Negara Kereta Api Menjadi Perusahaan Jawatan (Perjan), Lembar Negara Tahun 1971 Nomor 75.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 1990 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Jawatan (Perjan) Kereta Api Menjadi Perusahaan Umum (Perum) Kereta Api, Lembar Negara Tahun 1990.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara, Lembar Negara Tahun 1994 Nomor 69.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1998 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Kereta Api menjadi Perusahaan Persero, Lembar Negara Tahun 1998.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara, Lembar Negara Tahun 2005 Nomor 117.

Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-13/MBU/09/2014 tentang Pedoman Pendayagunaan Aset Tetap Badan Usaha Milik Negara.

Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor. PER-03/MBU/08/2017 tentang Pedoman Kerja Sama Badan Usaha Milik Negara, Berita Negara tahun 2017 Nomor 1147.

Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor. PER-04/MBU/08/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-03/MBU/08/2017 tentang Pedoman

Kerjasama Badan Usaha Milik Negara, Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1263.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Berita Negara Tahun 2016 Nomor 175.

### C. JURNAL

Budiwati, Septarina. (2019). “Prinsip Pacta Sunt Servanda Dan Daya Mengikatnya Dalam Kontrak Bisnis Perspektif Transendens”. Prosiding Seminar Nasional Hukum Transendental Universitas Muhammadiyah Surakarta. 41-46. <http://hdl.handle.net/11617/11265> Diakses 11 Oktober 2023.

Entriani, Anik. (2017). “Abitrase Dalam Sistem Hukum Di Indonesia” An-Nisbah : Jurnal Ekonomi Syariah, 3(2) : 278-293 <https://doi.org/10.21274/an.2017.3.2.277-293> Diakses 13 Desember 2023.

Herman & Noor, Hendry Julian. (2017). “Doktrin Tindakan Hukum Administrasi Negara Membuat Keputusan (*Beschikking*)” Jurnal Komunikasi Hukum, 3(1) : 82-95 <https://doi.org/10.23887/jkh.v3i1.9240> Diakses 24 Februari 2024.

Ikhwansyah, Isis. (2016). “Gugatan Terhadap Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Sebagai PT Persero dalam Perkara Perdata” Jurnal Hukum Acara Perdata, 2(2) : 193-210 <https://doi.org/10.36913/jhaper.v2i2.31> Diakses 24 Februari 2024.

- Nabilah, Rizki & Siswanti, Tutik. (2022). “Pengaruh Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) dan Total Aset Terhadap Laba Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Di Jakarta Timur” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*. 2(2) : 89-99 <https://jom.universitassuryadarma.ac.id/index.php/jima/article/view/80/83> Diakses 15 Oktober 2023.
- Nasrul, Oky. (2019). “Pemanfaatan Tanah Aset PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional II Sumatera Barat Oleh Pihak Ketiga”. *Soumatera Law Review*. 2(1) : 150-171. <https://doi.org/10.22216/soumlaw.v2i1.3554> Diakses 8 Oktober 2023.
- Novita, Natasia. (2017). “Evaluasi Kebijakan Pendayagunaan aset Tetap BUMN Pada Rumah Dinas PT. KAI (Persero) Daop 8 Kota Surabaya”. *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik*. 5 (1) : 1-9. [https://journal.unair.ac.id/KMP@evaluasi-kebijakan-pendayagunaan-aset-tetap-bumn-pada-rumah-dinas-pt.-kai-\(persero\)-daop-8-kota-surabaya-article-11766-media-138-category-8.html](https://journal.unair.ac.id/KMP@evaluasi-kebijakan-pendayagunaan-aset-tetap-bumn-pada-rumah-dinas-pt.-kai-(persero)-daop-8-kota-surabaya-article-11766-media-138-category-8.html) Diakses 8 Oktober 2023.
- Saliba, Aziz T. (2001). “Comparative Law Europe”, Universidade de Itauna dan Faculdades de Direito do Oeste de Minas, Brazil, *Contracts Law and Legislation*, 8(3); dikutip dari Purwanto, Harry. (2009). “Keberadaan Asas Pacta Sunt Servanda Dalam Perjanjian Internasional”, *Mimbar Hukum*. 21(1) 155-170 <https://doi.org/10.22146/jmh.16252> Diakses 15 Desember 2023.

Septiana, Amalia & Suparjo. (2021). “Peralihan Hak Atas Tanah Eks Perusahaan Kereta Api Belanda Menjadi Aset PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Daop IV Semarang Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1626.K/PDT/2017”, Indonesian Notary. 3(3) : 696-718 <https://scholarhub.ui.ac.id/notary/vol3/iss3/30> Diakses 10 Oktober 2023.

Tricahyono, Danan. (2021). “Meneliti Jalan Nasionalisasi Aset Perusahaan Belanda Di Indonesia: Merugikan Atau Menguntungkan”. Criksetra: Jurnal Pendidikan Sejarah. 10(2) : 98-113. <https://ejournal.unsri.ac.id/index.php/criksetra/article/view/13401> Diakses 8 Oktober 2023.

Wasini. (2016). “Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan Asing Menuju Ekonomi Berdikari”. Jurnal Paramita, 26(1) : 62-71. <https://doi.org/10.15294/paramita.v26i1.5146> Diakses 10 Oktober 2023.

#### **D. SKRIPSI**

Darwis, Try Mutia. (2019) “Akibat Hukum Pembatalan Perjanjian Sewa Aset PT. Kereta Api Indonesia”. Skripsi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. <http://repository.umsu.ac.id/bitstream/handle/123456789/8008/SKRIPSI%20TRY%20MUTIA%20DARWIS.pdf;jsessionid=4E4EFB4C612D6B5D2DA2D8F4A7E68A44?sequence=1> Diakses 12 Oktober 2023.

Diva, Namira Alya. (2022). “Pengelolaan Tanah PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Sebagai Bentuk Perlindungan Tanah Negara (Studi Kasus: Tanah PT. KAI Di Wilayah Stasiun Panarukan Daop IX Jember)”.  
 Diakses 12 Oktober 2023.

Skripsi Universitas Jember. <https://repository.unej.ac.id/handle/123456789/113818> Diakses 13 Oktober 2023.

Dewi, Lana Anggraini. (2018). “Pelaksanaan Sewa Menyewa Tanah Milik Perseroan terbatas Kereta Api Indonesia Daop IV Semarang Oleh Masyarakat Kelurahan Purwodadi”. Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. <http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/33363> Diakses 13 Oktober 2023.

Safitri, Intan Nurillah. (2019). “Implementasi Kebijakan PT. Kereta Api Indonesia Daop V Purwokerto dalam hal Penguasaan Aset Tanah”. Skripsi Universitas Semarang. <https://eskripsi.usm.ac.id/detail-A11A-291.html> Diakses 18 Januari 2024.

#### **E. TESIS**

Hastuti, Dwi. (2005). “Kajian Yuridis Perjanjian Sewa Menyewa Rumah Dinas Antara Perseroan Terbatas Kereta Api (Persero) dengan Penyewa di Kota Semarang”. Tesis Universitas Diponegoro. <http://eprints.undip.ac.id/15488/> Diakses 24 Februari 2024.

#### **F. LAIN-LAIN**

Pengadilan Negeri Surabaya, “Detil Perkara”, [http://sipp.pn-surabayakota.go.id/index.php/detil\\_perkara](http://sipp.pn-surabayakota.go.id/index.php/detil_perkara) Diakses 7 Desember 2023 pukul 15.17 WIB.

Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 195/Pdt.G/2014/PN.SBY.

Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2216/Pid.B/2015/PN.Sby.



PT. Kereta Api Indonesia (Persero), “Sejarah Perkeretaapian”,  
[https://www.kai.id/corporate/about\\_kai/](https://www.kai.id/corporate/about_kai/), Diakses 10 Oktober 2023 pukul  
10.15 WIB.

Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1963  
tentang Gagasan Menganggap *Burgelijke Wetboek* Tidak Sebagai  
Undang-Undang.

Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002  
tentang Penanganan Perkara yang Berkaitan dengan Azas *Nebis In Idem*.

Surat Edaran Menteri BUMN No. SE.09/MBU/2009.

Wawancara dengan Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Surabaya  
Bapak Jemmy Rudolf Manurung, S.H., M.H. pada tanggal 21 Desember  
2023 Pukul 09.30 WIB.

Wawancara dengan Staf Bagian Penjagaan Aset Daerah Operasi 8 Surabaya  
Ibu Febiola Savitri pada tanggal 27 Juli 2023 Pukul 13.55 WIB.